

ANALISIS POLITIK RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN BONE

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan
Pada Program Studi Ilmu Politik
Jurusan Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



OLEH :
SULVIANI
E 111 03 013
ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Pengajuan	4-6-2007
Jurusan	Flsipol
Program Studi	1 (Srtu) eks.
Penyusun	H
NPM	213
Nilai	

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS POLITIK RENCANA PEMEKARAN
KABUPATEN BONE

NAMA : SULVIANI

N I M : E 111 03 013


PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK


JURUSAN : POLITIK PEMERINTAHAN

Menyetujui,

Konsultan I

Konsultan II


Drs. H. ANDI YAKUB, MSi
Nip : 131 907 682


ANDI NAHARUDDIN, SIP, MSi
Nip : 132 300 778

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin


Dr. ARMIN ARSYAD, MSi
Nip: 131-961 985



HALAMAN PENERIMAAN

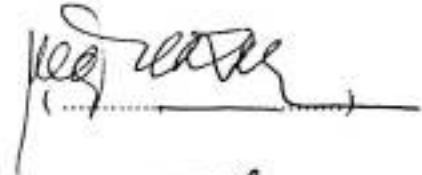
Judul : ANALISIS POLITIK RENCANA PEMEKARAN
KABUPATEN BONE
Nama : SULVIANI
No. Pokok : E 111 03 013
Jurusan : POLITIK PEMERINTAHAN
Program Studi : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, pada hari Senin, 21 Mei 2007 dan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (SI) pada bidang Ilmu Politik.

Makassar, 21 Mei 2007

Panitia Ujian :

Ketua : Prof. Dr. H. Mappa Nasrun, MA



Sekretaris : Andi Naharuddin, S.I.P. M.Si



Anggota : 1. Dr. Armin Arsyad, M.Si



2. Drs.H. Andi Yakub, M.Si



3. Drs. Muhammad Saad, MA



ABSTRAK

SULVIANI, E 111 03 013, dengan judul “Analisis Politik Rencana Pemekaran Kabupaten Bone” di bawah bimbingan Drs. H. Andi. Yakub, M.Si sebagai Konsultan I, dan Andi Naharuddin, SIP, M.Si sebagai Konsultan II.

Gerakan reformasi 98 merupakan tonggak awal proses demokasi (demokratisasi) di Indonesia. Gerak perubahan demokratik tersebut, memperlihatkan adanya penguatan-penguatan signifikan dalam pelembagaan sistem politik yang demokratis. Demokratisasi pada tingkatan lokal, mendapatkan ruangnya ketika undang-undang otonomi daerah yang termuat dalam UU. No 32 Tahun 2004. Seiring dengan hal tersebut, wacana demokratisasi pun bergeser pula, dari perhatian yang kuat pada proses politik pada level nasional, kepada gerak demokratisasi pada arus bawah masyarakat, dalam hal ini, pengembangan wilayah.

Fokus kajian ini adalah ingin melihat bagaimana pertarungan kepentingan yang terjadi dalam rangka rencana pemekaran Kabupaten Bone Barat dan faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya rencana pemekaran Kabupaten Bone.

Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini didasarkan pada penelitian Deskriptif analisis Data primer dikumpulkan dengan langsung ke lapangan, dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan yang dianggap mampu memberi informasi mendalam dan terbuka terhadap pokok permasalahan yang diangkat, sedangkan data-data sekunder didapat melalui, dokumen-dokumen, buku-buku yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pro dan kontra dari berbagai kalangan, baik itu tingkat atas atau elit maupun tingkat bawah dalam hal ini masyarakat Bone bagian Barat di Kabupaten Bone. Hal tersebut mengindikasikan adanya pertarungan kepentingan yang dianggap menjadi masalah dalam mewujudkan Kabupaten Bone. Kemudian mengenai rencana pemekaran Kabupaten Bone ditunjang dengan beberapa faktor yang paling mendukung, yaitu pertama, penduduk, ditandai dengan jumlah penduduk yang cukup dan tingkat pendidikan yang memadai. Kedua, luas wilayah, secara geografis sudah layak untuk dimekarkan. Ketiga, potensi ekonomi dan sumber daya alam, dimana dalam wilayah yang masuk dalam kategori Bone bagian Barat terdapat lahan pertanian yang luas dan sarana ekonomi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur tak terhingga pada keagungan Ilhai, Pencipta Alam Semesta atas segala rahmat yang dikaruniainya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan Shalawat kehadiranmu Ya Rasulullah beserta Ahlul baitmu yang tersucikan, semoga rahmat Allah selalu tercurahkan padamu beserta seluruh ahlul baitmu yang tersucikan. Semoga syafa'atmu beserta syafa'at Ahlul baitmu senantiasa tercurahkan kepada ummatmu yang menapaki jalan keselamatan yang engkau bawa, yang merupakan jalan intelektual tercerahkan sebagai kesempurnaan akhlak semesta yang terwariskan untuk kaummu.

Satu janji telah terpenuhi, satu harapan telah teraktual, satu penantian telah tersampaikan. Janji yang telah begitu lama terikrar yang sekian kali teringkari. Mungkin telah begitu membosankan untuk dinanti. Perjalanan panjang menembus ruang-ruang ide dan kontemplasi ternisbahakan lewat karya sederhana ini. Harapan penulis semoga karya sederhana inipun bermanfaat bagi kita semua walau dengan banyak kekurangan yang ada di dalamnya. Penulis sadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan sebagai konsekuensi dari keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis. Karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan tidak saja untuk semakin menyempurnakan skripsi ini, tetapi juga untuk pengembangan pengetahuan penulis selanjutnya.

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak hambatan. Namun berkat bantuan dan juga dorongan yang tak henti-henti dari sahabat-sahabat penulis. Hambatan-hambatan itu dapat dilalui. Olehnya pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi dorongan kepada penulis.

Kepada Ayahanda dan Ibundaku yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dorongan dan kasih sayang penuh yang turerahkan kepada penulis beserta do'a yang terus teralirkan sepanjang waktu mereka kepada penulis. Untuk beliau, Tak ada kata yang bisa ananda ungkapkan disini selain sujud dan cium ananda dikedua telapak kakimu, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Kasih Sayang – Nya bagimu serta semoga umur mereka terus dipanjangkan sehingga aku tetap memiliki waktu untuk meminta maaf dan mencintainya.

*Terima kasih untuk satu-satunya kakakku **Aroel**, yang terus memberikan motivasi dan selalu membantuku dalam segala hal demi mencapai yang terbaik bagi dirku. Kepada saudara-saudaraku (**Nu2ng, Adhe, Fauzi**) dan Keluarga Besarku yang senantiasa mendukung penulis.*

Pada kesempatan yang indah ini penulis tak lupa menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang berjasa bagi penulis, dengan hormat :

1. Prof. dr. Idrus Paturusi, SP.Ok, sebagai Rektor Univeristas Hasanuddin.
2. Prof. Deddy Tikson, PHd, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

3. Bapak DR. Armin Arsyad, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik-Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.
4. Bapak DR. M. Kausar Bailusy, MA selaku Penasehat Akademik, Bapak Drs. H. A. Yakub, M.Si selaku Pembimbing I, dan Bapak Andi Naharuddin, SIP, M.Si selaku pembimbing II serta Bapak Drs. Muhammad Saad, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP UH, yang senantiasa sabar dan tetap meluangkan waktunya guna membimbing penulis hingga tercapainya cita-cita penulis ini.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone beserta jajarannya dan seluruh Responden yang telah membantu kelancaran penelitian ini.
6. Institusi **HIMAPOL**, terima kasih atas tempaan pribadi dan karakter "Hitam – Putih". Pada akhirnya sang waktulah yang akan menjawab apa yang telah kita ukir dalam prasasti kebersamaan lewat kreasi-kreasi intelektual di Bumi Biru-Kuning.
7. Kanda Mamat (trima kasih atas bantuan dan kesabarannya menghadapi keluh kesah penulis), Bang Jack, K'Mu2N (makhluk paling gokil,kapan traktiran nontonnya...???), teman-teman pondok Nurul Huda, Kanda Abi, K'Anto, K'Ina, K'Sukri, K'Himar, Kanda Ishak yang dengan tulus meluangkan waktu untuk membantu penulis.
8. Semua orang yang karena keterbatasan daya ingat penulis sehingga tak dapat menyebutkannya satu per satu.

Makassar, Maret 2007

Penulis

THANK'S TO.....

Sahabat sekaligus saudara senasib seperjuangan **ABOND**"Miss Tulalit"
(Klo bisa tit..tit..tulalitnya dihilangkan yach), **HESTY**"Miss Curhat"
(Curhat teyuuuuuussssss, cape'dech), **ONHA**"Cewe'Perkasa" (Aduh
jeng, klo mukul yang pelan donk...he...he...he20x). Teman-temanku yang
berjiwa Malaysia **ANTI**"Kidi" (cewe'aneh, paling lincah tapi bae'tawwa
nda makan sabun..he...he...he...bercanda cez), **ANI**"Ve" (Selalu ceria
setiap saat), **IRA**"Camba" (Smangat!!!), **TRI**"Miss Burenk" (Cewe'penuh
misteri, tapi bukanji tawwa hantu), **Mbak Enis** (enis jie), **Ny.MIMI**
(cewe'yang penuh sensasi), Ibu **GADIS** (aih nda gadismi..jadilah Ibu
yang baik bagi anakmu), **RANDI**"FU CING YIN" (Kaku Man...gimanami
dengan "tulang rusuknya,...mungkin???), **AGUS**"Kasela" (Cool abiz
coy...!), **ECHA**"Panglima Tian Feng" (Sungguh berat perjalanan cintamu
kawan, SmAnGaT!!!), **IPOEL**"Dewa Mabuk" (Apaji...masa'hidup cuma
untuk patah hati terussss.....), Bpk.**DIKA** (Jadilah keluarga sakinah,
seperti keluarga cemara), **Salas** (cowo'misterius, tapi nda bikin
penasaranji), **ADE** (Cowo'yang penuh percaya diri), **ALIM**"Bocah tua
nakal" (Besok2 klo ketemu sdh harus tinggi yach), **FAJAR** (Itu badan
ato tiang listrik sich???), **KASMAN** (Ampunka kodoooong), **KE2N**
(PeDeHú di'), Orang yang pernah mengisi hatiku (aku tak meminta
banyak...aku hanya memintamu bisa tersenyum laGI padaku seperti
dulu....), untuk **SESEORANG** yang akan berada disampingku dan
menemaniku di sepanjang hidup suatu saat nanti.....

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Analisis Politik.....	11
B. Konsep Otonomi Daerah.....	12
C. Konsep Pemekaran Wilayah.....	18
D. Teori Konflik.....	21
E. Teori Elit.....	26
F. Model Analisis.....	31
G. Definisi Operasional.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Unit Analisis.....	34
C. Jenis Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisa Data.....	38

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kabupaten Bone.....	41
B. Struktur Pemerintahan.....	42
C. Karakteristik.....	45
D. Sejarah Kabupaten Bone.....	46
E. Visi dan Misi Kabupaten Bone.....	50
F. Kondisi Sosial Budaya.....	50
G. Potensi Wilayah.....	52
H. Pariwisata.....	60
I. Penduduk dan Tenaga Kerja.....	61

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertarungan Kepentingan Rencana Pemekaran Kabupaten Bone	63
A. 1. Kelompok Pro Pemekaran.....	65
A. 2. Kelompok Kontra Pemekaran.....	67
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Munculnya Rencana Pemekaran Kabupaten Bone	70
B. 1. Sumber Daya Manusia.....	70
B. 2. Luas Wilaya dan Budaya.....	71
B. 3. Potensi Ekonomi	72
B. 4. Jumlah Penduduk.....	74
B. 5. Sumber Daya Alam.....	74

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu kontemporer menyoal perbaikan nasib wilayah di nusantara masa kini, maka tidak dapat dipisahkan dari gencarnya tuntutan pada adanya pemekaran wilayah (daerah). Persepsi demikian itu berdasar pada adanya asumsi bahwa luas wilayah akan menjadi parameter utama dalam keterjangkauan ataupun akses pembangunan. Jika asumsi itu dibuat menjadi argumentasi utama maka tentu saja dapat dijadikan alasan bahwa luas daerah itu terkait pula dengan pendanaan pembangunan yakni pendapatan asli daerahnya (PAD). Maka dengan begitu, sumber-sumber yang dapat diandalkan menjadi dana pembangunan menjadi asumsi kedua setelah asumsi pertama yang disebutkan di atas.

Akan tetapi, seberapa dekatkah relasi antara kedua asumsi tersebut dengan isu kemajuan daerah, tentu saja masih dapat diperdebatkan secara alot. Namun demikian, secara gamblang dapat disebutkan bahwa kedua asumsi itu memang menjadi hipotesa dasar dalam mewujudkan keterbaikan daerah. Tentu saja, persepsi yang demikian itu bertolak belakang dari berbagai fenomena dan aspek historis yang mendampingi pembangunan itu sendiri. Dimana beberapa daerah menjadi terlupakan dalam pembangunan yang disebabkan oleh akses yang sangat jauh dari ibukota daerah.

Fenomena itu adalah seperti terjadinya kecenderungan pemusatan pembangunan di kawasan ibukota pemerintahan (kabupaten, kotamadya bahkan provinsi), yaitu semacam membangun kawasan rurban yang menjadi penyangga kawasan urban. Sudah barang tentu pula bahwa peningkatan kawasan urban itu bertujuan untuk menyokong kawasan kota. Akibatnya, terjadilah ketimpangan pembangunan di berbagai kawasan. Daerah kota cenderung menjadi sentralisasi industri, sedang daerah lain menjadi slum area. Keadaan ini dapat dilihat pada ironi pembangunan beberapa kota di Indonesia yang melupakan aspek kawasan agraris itu.

Konsentrasi pembangunan pada pusat metropol mengakibatkan ketimpangan pembangunan dengan daerah agraris, fokus pembangunan pada industri mengakibatkan naiknya kesenjangan sosial, matinya sektor riel yang banyak dimasuki penduduk, meningkatnya angka pengangguran serta merebaknya kemiskinan. Oleh karena itu, adanya isu pemekaran daerah umumnya yang terjadi di Indonesia dan Sulawesi Selatan pada khususnya menjadi relevan untuk ditanggapi.

Setidaknya terdapat dua aspek utama yang menyokong aspek pembangunan itu sendiri, yakni aspek dana dan aspek sumber daya manusia. Aspek pertama merujuk pada biaya (*cost*) yang akan dibuat untuk mendanai pembangunan sementara aspek kedua menjadi pengelola pembangunan. Antara kedua variabel ini memiliki keterikatan

yakni bahwa seberapa efektif dana yang tersedia digunakan untuk membangun dan sampai sejauhmana kemampuan manusianya untuk mengelola dana yang ada. Dua hal itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, namun yang menjadi parameter utamanya adalah manusia itu sendiri. Mengikuti realita yang terjadi selama ini adalah bahwa semakin tinggi biaya (*cost*) pembangunan itu maka semakin tinggi pula tingkat penyelewengan dana, sementara jika dana itu kecil, maka pembangunan tidak terlaksana dengan dalih ketiadaan dana.

Terlepas dari apa yang menyelimuti persoalan itu, setidaknya di depan mata terpampang gugatan ketimpangan pembangunan di berbagai kawasan dan menjadikan pemekaran daerah menjadi solusi dalam upaya mengejar pembangunan yang termarginalkan di kawasan itu. Katakanlah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang sedang menunggu realisasi pemekaran Kabupaten ini menjadi empat yakni Bone, Bone Barat, Bone Utara, dan Bone Selatan.

Menyoal pemekaran daerah yang menjadi trend pembangunan di nusantara maka setidaknya gugatan itu direspon demi menghindari adanya ketimpangan pembangunan di berbagai kawasan. Untuk itu, dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan di kawasan yang dimekarkan, maka langkah pertama yang mesti dilakukan adalah distribusi sumber daya yang menyangkut aparat pemerintahan, kemudian dana

alokasi pembangunan yang didasarkan pada sumber-sumber penerimaan daerah.

Sumber daya manusia yang menjadi motor pembangunan adalah keharusan karena sebaik apapun sebuah rencana dan strategi yang disusun dan dibuat, akan menjadi mentah dan buyar akibat ketiadaan mental pembangunan yang melekat pada dirinya. Jika demikian yang terjadi maka, isu pemekaran daerah yang dilemparkan atas nama warga atau masyarakat hanyalah merupakan sarana untuk membagi kursi pemerintahan. Dimana dengan begitu akan membuka akses yang luas pada berbagai posisi-posisi penting, penerimaan pegawai yang banyak untuk menduduki pos tertentu yang hanya menambah beban negara.

Dengan kata lain, bahwa peristiwa itu hanyalah merupakan reduplikasi sejarah, divergen dan ambigu. Sebagai bentuk tindakan untuk mengejar cita-cita personal dengan melupakan kepentingan orang banyak. Kita mesti belajar dan banyak melihat bahwa sejarah kita telah dikotori oleh hal-hal yang demikian buruk, penistaan terhadap pembangunan, pengingkaran terhadap sumpah jabatan, kenaikan anggaran, serta perilaku jabatan yang bertolak belakang dengan orasi pemerintahan. Meningkatnya penyalahgunaan kekuasaan menjadi keterbelakangan pembangunan di kawasan nusantara, serta banyak hal lain yang telah menjadi bom waktu bagi sejarah pembangunan dan kenegaraan di Indonesia.

Akan sangat disayangkan, jika ternyata cita-cita pemekaran daerah dilakukan hanyalah untuk tujuan seperti disebut di atas. Untuk itu, kita hanya dapat berharap bahwa pemekaran daerah dapat menjadi lampu hijau dalam pembangunan masa depan daerah yang lebih baik. Tidak saja dalam pembangunan fisik (industri) maka daerah dapat dinyatakan maju, tetapi cara berfikir masyarakat, pola hidup masyarakat dimana mereka tak lagi dirundung oleh budaya tradisi dengan sikap tradisional, tetapi telah beralih ke warisan budaya tradisi dengan sikap yang tak tradisional. Pembangunan seperti ini akan jauh lebih bermanfaat, jika dibandingkan dengan pembangunan dengan konsentrasi industri yang lebih menciptakan budaya ketergantungan.

Oleh karena itu, untuk masa depan pembangunan kawasan yang lebih baik adalah dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan, pengetahuan bagaimana menciptakan kemajuan personalnya. Aspek ini akan lebih jauh memberikan kontribusi nyata kepada pembangunan daerah dimana mereka memiliki kesempatan untuk mengejar keinginannya. Dengan begitu, sektor riil akan berjalan, pengangguran menjadi menurun, pendapatan perkapita meningkat dengan resiko kerugian sosial yang kecil.

Arah pembangunan seperti ini memiliki andil yang bermanfaat dalam kerangka *penatalayanan* terhadap masyarakat. Tanpa adanya upaya

membangun manusianya, maka niscaya pembangunan lainpun akan tertunda dan hanya pula akan menceraiberaikan manusia dengan warisan budayanya yakni dengan meningkatnya budaya kontemporer berupa konsumerisme dan ketergantungan. Katakanlah dengan masyarakat petani miskin yang terlupakan yang ada di desa, tanpa adanya sentuhan terhadap aspek budaya petani maka, apapun pembangunan yang dilakukan tidak akan pernah mengangkat nasib mereka menjadi petani yang lebih baik. Dalam artian lain, mereka akan tetap menjadi peasant yang akan bersaing dengan era globalisasian industri. Mereka tidak akan pernah menjadi petani yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Mereka menjadi akan semakin terbelakang apalagi menyinggung tentang neoliberalisme pertanian di desa. Oleh karenanya, harapan tentu saja tertuju pada pemekaran daerah yang dengan memutar arah pembangunan yang berbasis komunitas (*community development*). Dengan begitu, pemekaran daerah dapat dijadikan acuan pembangunan daerah pada era selanjutnya.

Kabupaten Bone adalah salah satu dari sekian banyak kabupaten yang ingin mencoba melakukan pemekaran seperti kabupaten lain yang ada di wilayah Indonesia. Kabupaten yang ingin mencoba melakukan pemekaran yang akan dibentuk dengan tujuan mengarah pada efisiensi pelayanan masyarakat dalam naungan pembangunan politik. Menurut Ryass Rasyid (1997: 12) bahwa fungsi utama pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah adalah pelayanan (*services*), pemberdayaan

(*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Aktualisasi fungsi-fungsi tersebut berupaya untuk mendekatkan realitas pelayanan Negara kepada masyarakat secara efisien dan se-efektif mungkin. Tujuan yang akan dicapai adalah terciptanya keadilan masyarakat dalam bidang pelayanan, dalam fungsi pemberdayaan terkandung tujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat dan dalam fungsi pembangunan terkandung tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat secara merata.

Namun yang menjadi permasalahan kemudian apakah ini adalah keinginan yang tulus dari masyarakat di Kabupaten Bone, khususnya Bone bagian Barat, sehingga biasanya mengarah pada kepentingan orang banyak.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut :

" Analisis Politik Rencana Pemekaran Kabupaten Bone"

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka masalah yang akan diteliti dibatasi dalam rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertarungan kepentingan terhadap adanya rencana pemekaran Kabupaten Bone ?

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya gagasan pemekaran Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan bertujuan untuk :

- Untuk menggambarkan pertarungan kepentingan terhadap adanya rencana pemekaran Kabupaten Bone.
- Untuk menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gagasan pemekaran Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat digunakan untuk beberapa kepentingan, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi penelitian-penelitian ilmiah, selanjutnya dapat dijadikan bahan komparatif bagi yang mengkaji masalah Otonomi Daerah terutama masalah pemekaran.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah, dalam penyusunan kebijakan pemerintah dalam mengkaji masalah Otonomi Daerah terutama masalah pemekaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Gerakan reformasi Tahun 1998 merupakan tonggak awal proses demokrasi (demokratisasi) di Indonesia. Gerak perubahan demokratik tersebut, memperlihatkan adanya penguatan-penguatan signifikan dalam pelebagaan sistem politik yang demokratis. Demokratisasi pada tingkatan lokal, mendapatkan ruangnya ketika Undang-Undang Otonomi Daerah yang termuat dalam UU. No 32 Tahun 2004. Seiring dengan hal tersebut, wacana demokratisasi pun bergeser pula, dari perhatian yang kuat pada proses politik pada level nasional kepada gerak demokratisasi pada arus bawah masyarakat, dalam hal ini pemerintahan desa. Fokus kajian ini adalah ingin melihat faktor-faktor yang menyebabkan munculnya rencana pemekaran Kabupaten Bone.

Kebijakan otonomi daerah, telah diletakkan dasar-dasarnya sejak jauh sebelum terjadinya krisis nasional yang diikuti dengan gelombang reformasi besar-besaran di Tanah Air. Namun, perumusan kebijakan otonomi daerah itu masih bersifat setengah-setengah dan dilakukan tahap demi tahap yang sangat lamban. Setelah terjadinya reformasi yang disertai pula oleh gelombang tuntutan ketidakpuasan masyarakat di berbagai daerah mengenai pola hubungan antara pusat dan daerah yang dirasakan tidak adil, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mempercepat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah itu dan bahkan

dengan skala yang sangat luas yang diletakkan di atas landasan konstitusional dan operasional yang lebih radikal.

Dalam keseluruhan perangkat perundang-undangan yang mengatur kebijakan otonomi daerah itu, dapat ditemukan beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan paradigma pemikiran dalam menelaah mengenai berbagai kemungkinan yang akan terjadi di daerah, terutama dalam hubungannya dengan kegiatan investasi dan upaya mendorong tumbuhnya roda kegiatan ekonomi dalam masyarakat di daerah-daerah. Prinsip-prinsip dasar itu dapat disarikan sebagai berikut.

A. Pengertian Analisis Politik

Berdasarkan kamus lengkap Bahasa Indonesia konsep tentang Analisis diartikan sebagai suatu pembahasan/penguraian terhadap suatu masalah yang akan menjelaskan bagian-bagian dari masaiah tersebut, untuk mengetahui latar belakang dan duduk persoalan dari masalah tersebut.

Sementara politik menurut para ahli diartikan berbeda-beda dalam konteks kalimatnya tetapi memiliki kesamaan makna, sehingga bagaimanapun politik itu didefinisikan, maka satu hal yang sudah pasti, bahwa politik itu menyangkut kekuasaan bagaimana memperoleh, menggunakan dan mempertahankan kekuasaan. politik dapat pula diartikan sebagai cara mengatur pemerintahan dan masyarakat.

Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, politik dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan mengenai ketatanegaraan dan kenegaraan; segala urusan dan tindakan kebijakan mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain atau diartikan pula sebagai siasat. Filsafat politik merupakan studi nalar yang diterapkan pada kejadian dalam kehidupan manusia, hal ini merupakan tekanan utama ilmu politik, atau lebih tepatnya filsafat politik merupakan ilmu politik untuk jangka panjang. Lembaga-lembaga tujuan filsafat dalam praktik pemerintahan berasal dari penerapan yang demikian. Lembaga-lembaga 'mengatur' kehidupan masyarakat dengan sarana-sarana politik. Ketika dilaksanakan mereka mempengaruhi karakter tujuan politik. Karena itu pemerintah dengan sistem perwakilan merupakan lembaga yang harus ada sebelum demokrasi tampil. Lembaga-lembaga itu tidak dengan sendirinya ada, tetapi terdiri dari orang yang bertindak dengan penafsiran individual mereka sendiri, tentang kesesuaian badan-badan pemerintah untuk mengatur kemudian orang tidak membatasi tindakan politik mereka pada apa yang digariskan oleh filosof.

B. Konsep Otonomi Daerah

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang telah diperbarui, Ketetapan MPR dan UU, sistem pemerintahan kita telah memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat dan

pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini dianggap sangat penting, karena tantangan perkembangan lokal, nasional, regional dan internasional di berbagai bidang ekonomi, politik dan kebudayaan terus meningkat dan mengharuskan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pelaksanaan otonomi daerah itu diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya masing-masing serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman antar daerah.

Kebijakan nasional mengenai otonomi daerah dan pemerintahan daerah ini, telah dituangkan dalam bentuk UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dilengkapi oleh UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan ditetapkannya kedua UU ini, maka UU yang mengatur materi yang sama yang ada sebelumnya dan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan, dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-Undang yang dinyatakan tidak berlaku lagi itu adalah UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 No.3037), UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (LN Tahun 1979 No. 56

dan TLN Tahun 1979 No.3153), dan UU No.32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (LN Tahun 1956 No.77 dan TLN Tahun 1956 No.1442).

Untuk memperkuat kebijakan otonomi daerah itu, dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 telah pula ditetapkan Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 tentang Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang antara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah itu harus dilaksanakan dengan menekankan pentingnya kemandirian dan keprakarsaan dari daerah-daerah otonom untuk menyelenggarakan otonomi daerah tanpa harus terlebih dulu menunggu petunjuk dan pengaturan dari pemerintahan pusat. Bahkan, kebijakan nasional otonomi daerah ini telah dikukuhkan pula dalam materi perubahan Pasal 18 UUD 1945.

Desentralisasi Kewenangan

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan

pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya jurang ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah. Untuk menjamin agar perasaan diperlakukan tidak adil yang muncul di berbagai daerah seluruh Indonesia tidak makin meluas dan terus meningkat yang pada gilirannya akan sangat membahayakan integrasi nasional, maka kebijakan otonomi daerah ini dinilai mutlak harus diterapkan dalam waktu yang secepat-cepatnya sesuai dengan tingkat kesiapan daerah sendiri. Bahkan, Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 menegaskan bahwa daerah-daerah tidak perlu menunggu petunjuk dan aturan-aturan dari pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah itu sebagaimana mestinya. Sebelum dikeluarkannya peraturan yang diperlukan dari pusat, pemerintahan daerah dapat menentukan sendiri pengaturan mengenai soal-soal yang bersangkutan melalui penetapan Peraturan Daerah. Setelah peraturan pusat yang dimaksud ditetapkan, barulah peraturan daerah tersebut disesuaikan sebagaimana mestinya, sekedar untuk itu memang perlu diadakan penyesuaian.

Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi pada pokoknya juga perlu diwujudkan atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu. Dalam kultur masyarakat kita yang paternalistik, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu tidak akan berhasil apabila tidak dibarengi dengan upaya sadar untuk membangun keprakarsaan dan kemandirian daerah sendiri.

Apa yang telah menjadi dampak program desentralisasi Indonesia yang telah diluncurkan beberapa tahun lalu, tentang manajemen studi kasus tentang rencana atau pembentukan kabupaten baru ini ditemukan bahwa hasilnya positif. Tetapi tetap menjadi pertanyaan apakah hasil ini berkesinambungan – dan apakah sukses dan bisa diterapkan ke tempat-tempat lain.

Indonesia memindahkan kekuasaannya yang luas ke kabupaten-kabupaten dan kota-kota – tingkat kedua pemerintahan daerah sesudah provinsi – diikuti dengan pemindahan fiskal cukup banyak dari pusat. Peraturan yang mendasari desentralisasi juga memperbolehkan penciptaan kawasan baru dengan cara pemekaran atau penggabungan unit-unit administratif yang eksis. Prakteknya, proses yang dikenal sebagai pemekaran tersebut berarti tidak bergabung tetapi merupakan pemecahan

secara administratif dan penciptaan beberapa provinsi baru serta hampir 100 kabupaten baru.

Dengan beberapa dari kabupaten itu menggambarkan garis etnis dan meningkatnya ekonomi yang cepat bagi politik daerah, ada ketakutan akan terjadi konflik baru dalam soal tanah, sumber daya atau perbatasan dan adanya politisi lokal yang memanipulasi ketegangan untuk kepentingan personal. Namun begitu, proses desentralisasi juga telah meningkatkan prospek pencegahan dan manajemen konflik yang lebih baik melalui munculnya pemerintahan lokal yang lebih dipercaya.

Ada beberapa kesimpulan yang lebih umum tentang desentralisasi, yaitu :

- Kurangnya kejelasan hukum menyangkut desentralisasi, disertai dengan keraguan lembaga-lembaga pemerintah dari pemerintah pusat untuk menyerahkan kekuasaan, menghalangi kemampuan pemerintah daerah dalam menghindari konflik secara efektif.
- Kesuksesan sebuah kabupaten baru dalam mencegah atau membatasi konflik sebagian besar tergantung pada kapasitas, komitmen dan koneksi bupati.
- Ada kontradiksi yang fundamental di antara penguasaan pemerintah pusat atas pengawasan terhadap polisi dan fungsi pengamanan lain, serta tanggung jawab atas hukum dan perintah para bupati berdasarkan undang-undang desentralisasi. Polisi

hanya bisa disebar secara efektif untuk menangani konflik bila mereka bertanggung jawab untuk dan didanai oleh pemerintah daerah.

- Manajemen efektif atas pertikaian tanah merupakan hal kritis untuk mencegah konflik.
- Memperkuat sistem peradilan kriminal merupakan kunci untuk menegakkan dan memelihara perdamaian di antara pihak-pihak dalam suatu konflik. "Penciptaan perdamaian' melalui upacara tradisional tidaklah cukup.

C. Konsep Pemekaran Wilayah

Konsep pengembangan atau pemekaran wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang bersifat dinamis. Dengan kata lain, konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang senantiasa berkembang yang telah diujiterapkan dan kemudian dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia.

Secara konseptual pengertian pemekaran wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan

menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

Berpijak pada pengertian diatas maka pembangunan seyogyanya tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumberdaya alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya.

Pemekaran-pemekaran pada berbagai tingkatan pemerintah dewasa ini adalah suatu kebutuhan mendesak guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Walaupun tindakan pemekaran yang dilakukan tidak terlepas dari persyaratan-persyaratan yang diatur oleh undang-undang, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, letak wilayah, sarana dan prasarana, kemampuan ekonomi/ potensi daerah, faktor sosial, budaya dan kehidupan kemasyarakatan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan dan Penggabungan Daerah, menjelaskan bahwa

pembentukan kabupaten ditetapkan melalui kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Kemampuan ekonomi;
- b. Potensi daerah;
- c. Sosial budaya;
- d. Sosial politik;
- e. Jumlah penduduk;
- f. Luas daerah.

Pada beberapa provinsi pemekaran mencerminkan pelaksanaan pemekaran daerah yang sejauh ini membawa dampak lebih dinamis bagi pembangunan fisik. Penilaian publik pun cenderung lebih banyak melihat sisi kasatmata dari apa yang dinamakan era desentralisasi dan otonomi daerah. Rasa kepuasan lebih menonjol dinyatakan terhadap pembangunan infrastruktur daerah, pusat bisnis, perkantoran, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan.

Persoalan yang kemudian muncul adalah adanya upaya daerah untuk berlomba memekarkan diri. Upaya itu dilakukan baik oleh elite lokal, sekelompok massa, maupun politisi pusat. Akibatnya, kesan terjadinya "lapar" kekuasaan tak terhindarkan. Kondisi itu ditunjang mekanisme pemekaran suatu daerah yang relatif tidak sulit. Untuk mewujudkan sebuah kabupaten/provinsi baru, misalnya, diperlukan syarat berupa skor penilaian atas syarat teknis, minimal tiga kecamatan untuk kota/kabupaten

baru atau tiga kabupaten/kota untuk provinsi baru. Sampai saat ini telah terbentuk 7 provinsi baru, 144 kabupaten, dan 27 kota yang merupakan hasil pemekaran. Sementara usulan yang masuk dan masih ditahan mencapai angka di atas seratus wilayah.

Dalam pandangan atau opini publik, sejumlah daerah baru yang dibentuk memang masih menjadi tanda tanya. Secara garis besar, sebagian besar publik ingin kebijakan pemekaran daerah diteruskan, dengan penuh tanggungjawab.

D. Teori Konflik

Tujuan bagian ini adalah untuk membahas tema-tema dan aliran-aliran pemikiran teori konflik. Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan ruang lingkup dan ragam konflik sehingga konflik sebagai fenomena sosial dapat diletakkan dalam perspektif yang tepat. Tinjauan teori konflik akan mengetengahkan sejumlah pengamatan. Pertama, ada banyak sekali literatur yang ditulis tentang sifat dan teori konflik, terutama yang berhubungan dengan peperangan. Kedua, kurangnya kesepakatan (*consensus*) antara pandangan kontemporer dan historis mengenai konflik manusia. Ketiga, di antara literatur yang sangat erat kaitannya (relevan) dengan para ahli teori ilmu politik, ada beberapa dikotomi yang mengarah ke pencarian paradigma yang dominan.

Konflik menyebabkan terjadinya interaksi pada tataran yang lebih serius dari sekedar kompetisi. Meskipun, sebagaimana yang dinyatakan Schelling, konflik, kompetisi, dan kerjasama pada dasarnya saling berkaitan, konflik terjadi manakala tujuan, kebutuhan, dan nilai-nilai kelompok-kelompok yang bersaing bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi, walaupun belum tentu berbentuk kekerasan.

Di antara asumsi-asumsi kaum behavioris yang paling penting adalah keyakinan bahwa akar penyebab perang itu terletak pada sifat dan perilaku manusia; dan keyakinan bahwa ada hubungan yang erat/penting antara konflik intrapersonal dan konflik yang merambah tata sosial eksternal. Kaum behavioris meyakini peran sentral hipotesa stimulus-respons. Penganut aliran ini berusaha mengukuhkan apakah manusia memiliki karakteristik biologis atau psikologis yang akan membuat kita cenderung ke arah agresi atau konflik. Mereka juga berusaha menyelidiki hubungan antara individu dan keberadaannya di lingkungannya. Mereka ingin memperhitungkan kemungkinan, dengan cara berpikir induktif, variable-variabel khusus mengenai konflik intrapersonal dan generalisasi mengenai konflik interpersonal (antar individu) dan internasional (antar bangsa). Di antara teori-teori yang paling umum/lazim yang akan kita tinjau adalah: Perilaku Hewani (*Animal Behavior*), Teori Agresi Bawaan/Instinktif, Teori Agresi Frustrasi, Teori Pembelajaran Sosial dan Teori Identitas Sosial.

Di kalangan kaum behavioris, para ahli biologi dan psikologi telah menggunakan studi-studi perilaku atau etologis hewan untuk menggambarkan kemungkinan adanya akibat wajar pada perilaku manusia. Manusia seringkali mengabaikan kenyataan bahwa kita adalah bagian dari dunia hewan (*animal kingdom*). Namun demikian, kita harus hati-hati agar tidak mengambil kesimpulan langsung mengenai perilaku manusia dari perilaku hewan.

Peperangan terorganisasi merupakan bagian dari alam sebelum manusia tiba di tempat itu. Nafsu menyerang yang terkoordinasi dan maksud politis yang jelas yang dengannya serangga-serangga sosial tertentu melakukan agresi menunjukkan bahwa, dari perilakunya, manusia bukan satu-satunya yang masuk tentara atau berperang sebagai bagian dari tentara (namun yang menjadi kunci perbedaannya adalah motivasinya). Semut-semut berperang karena 'gene'-nya menuntut mereka supaya berperang. Sebaliknya, manusia menciptakan fenomena menurut versinya sendiri.

Para ahli psikologi awal sering berdalil bahwa ada mekanisme instink atau biologis bawaan yang membuat manusia cenderung melakukan agresi. Hal ini mengarah pada pembentukan teori instink mengenai agresi. Teori ini menggabungkan unsur-unsur studi psikologi awal (misalnya instink kematian dari Freud) dan teori-teori sosial Darwin mengenai pertarungan/peperangan untuk kelangsungan hidup (. Teori ini

kemudian dianggap tidak bisa dipercaya oleh para ahli biologi yang tidak percaya adanya mekanisme seperti itu.

Seperti kebanyakan teori-teori perintis sebelumnya (*pioneering*), '*innate theory*' membuka jalan bagi hipotesa-hipotesa canggih dan ilmiah 'over time'. Perkembangan penting dari karya (*work*) ini adalah berkembangnya teori 'Frustrasi-Agresi.' Asumsi dasar teori ini adalah bahwa semua agresi, baik antar individu/kelompok maupun antar bangsa, berakar pada rasa frustrasi pencapaian tujuan salah satu atau lebih pelaku agresi itu. Artinya, konflik itu dapat ditelusuri pada tidak tercapainya tujuan pribadi atau kelompok dan rasa frustrasi yang ditimbulkannya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teori ini adalah: apakah semua frustrasi secara otomatis mengarah pada agresi, dan dapatkah semua agresi dan konflik ditelusuri berasal dari rasa frustrasi? Pertanyaan-pertanyaan ini, dan juga tantangan tidak cukupnya hubungan kausal (sebab-akibat) pada agresi, dan pandangan-pandangan lainnya mengenai perilaku manusia mengarah pada pendiskreditan teori Frustrasi-Agresi dan perkembangan berikutnya teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) dan teori identitas sosial (*social identity theory*).

Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berdasar hipotesa bahwa agresi bukanlah sifat dasar bawaan (*innate*) atau naluri/instink (*instinctual*) melainkan hasil pembelajaran melalui proses sosialisasi. Seseorang memperoleh sifat agresi dengan cara

mempelajarinya dari rumah, sekolah, dan dari interaksinya dengan lingkungan pada umumnya. Interaksi dalam masyarakat itu membantu memusatkan dan memicu sifat agresi yang terpendam terhadap musuh. Konsep ini penting, terutama ketika konflik itu bersifat etno-nasional atau sektarian.

Kita menciptakan identitas sosial untuk menyederhanakan hubungan eksternal kita. Lebih jauh lagi, ada kebutuhan manusia untuk memiliki rasa harga diri (*self esteem and self worth*) yang kita transfer ke dalam kelompok kita sendiri. Kita juga menata lingkungan kita dengan perbandingan sosial antar kelompok. Konsep 'dalam kelompok' (*ingroups*) dan 'luar kelompok' (*outgroups*) itu penting dalam analisis ini.

Tentu saja, hubungan-hubungan kelompok adalah akar dari masalah-masalah berbagai contoh konflik. Inti akar masalah itu adalah hubungan antar komunitas/kelompok minoritas dan mayoritas. Tidak diragukan lagi bahwa sistem yang tidak stabil dari perpecahan sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas lebih mungkin dipandang tidak sah (*illegitimate*) dibandingkan dengan sistem yang stabil; dan, sebaliknya, bahwa sistem yang dipandang tidak sah akan mengandung benih-benih ketidakstabilan. Hubungan antara pandangan ketidakstabilan dan ketidaksahan sistem (pihak-pihak) yang berbeda inilah yang kemungkinan menjadi bumbu yang ampuh terjadinya peralihan dari

penerimaan kelompok minoritas terhadap status quo ke penolakannya (Kusnadi dan Burhanuddin, 1997).

Akibatnya, kelompok-kelompok itu menempatkan pentingnya pandangan keabsahan ke dalam lingkungan sosialnya. Legitimasi (keabsahan) merupakan konsep yang penting bagi kelompok-kelompok yang terlibat konflik karena mereka memandang negara tidak sah.

Sosialisasi merupakan konsep yang penting, begitu juga perbandingan-perbandingan kelompok, identitas diri dan kelompok yang positif dan pandangan ketidakabsahan oleh kelompok-kelompok minoritas. Setelah hal-hal ini difahami, perilaku agresif mungkin bisa dijelaskan. Betapapun mendalamnya analisa empiris terhadap tataran mikro penelitian kita, masih tetap tidak bisa memperhitungkan semua variabel dan sifat konflik, terutama pada tataran sadar.

E. Teori Elit

Sulit dipungkiri bahwa dengan mudah di masyarakat dapat ditemukan adanya sekelompok individu yang mempunyai peran dan pengaruh lebih besar apabila dibandingkan dengan peran dan pengaruh yang dimiliki individu-individu yang lainnya. Mereka mempunyai kemampuan untuk memainkan peran dan pengaruh tersebut karena keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. Dengan keunggulan-keunggulan yang melekat pada dirinya, mereka dapat mengelola dan mengendalikan

cabang kehidupan tertentu, di mana pada gilirannya yang bersangkutan akan dapat memainkan peran dan pengaruhnya tersebut untuk menentukan corak dan arah bergulirnya roda kehidupan masyarakat.

Kondisi seperti ini, dinyatakan oleh para ilmuwan sosial, merupakan hal yang wajar dan alamiah sifatnya. Hal tersebut dikarenakan dengan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, mereka akan mampu membangun kekuatan yang pada saatnya dapat dipergunakan untuk memaksa pihak lain untuk tunduk dan patuh pada kehendaknya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, pihak lain yang tidak mempunyai keunggulan dapat dikuasainya. Semakin besar keunggulan yang dimilikinya akan menjadikan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang semakin besar pula, yang pada gilirannya akan menjadikan muncul dan tumbuhnya kekuasaan pada diri individu tadi. Dan dengan kekuasaan yang besar, dia akan lebih mampu memainkan peran dan pengaruhnya pada cabang kehidupan di mana yang bersangkutan memiliki keunggulan.

Mereka yang memiliki keunggulan itulah yang disebut dengan kelompok elit. Keunggulan yang melekat pada dirinya akan menggiring mereka bergabung dalam kelompok elit yang mempunyai perbedaan dengan anggota masyarakat kebanyakan lainnya yang tidak memiliki keunggulan. Sebutan elit atau terminologi elit, sebagaimana diungkapkan oleh Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, pemikir yang tergolong dalam 'teoritis elit', memang menunjukkan pada sekelompok atau golongan yang

ada di suatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan yang lainnya.

Sebelumnya telah diartikan secara sederhana bahwa elit adalah sekumpulan orang, yakni sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa. Elitlah yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berada di lingkaran kekuasaan maupun yang sedang berkuasa (S.P. Varma, 2003). Hal ini melanjutkan apa yang sebelumnya telah dikatakan oleh Pareto:

"...bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat".

Bersama Mosca, Pareto kemudian membagi stratifikasi masyarakat ke dalam tiga kategori yaitu (1) elit yang memerintah (*governing elite*); (2) elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*), dan; (3) massa umum (*non-elite*). Dari definisi ini, tidak saja diungkapkan apa yang dimaksud dengan elit, tetapi sekaligus memperkenalkan fungsi dari elit yaitu kaum elit mempunyai tanggung jawab sosial untuk melayani kolektivitas. (Pada sisi inilah relevansi perlunya penelitian tentang isu pemekaran Kabupaten Bone Barat dilihat dari sudut pandang elitnya).

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik satu benang merah bahwa dalam setiap cabang kehidupan di masyarakat akan memunculkan

sebagian anggotanya sebagai elit. Dengan demikian di masyarakat akan ditemukan adanya elit di bidang politik, hukum, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya. Atau dengan kata lain, bahwa di setiap bidang kehidupan terdapat sejumlah anggota masyarakat yang mempunyai keunggulan dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya, dan mereka menduduki struktur puncak bidang kehidupan tersebut. Merekalah yang disebut elit pada bidang kehidupan masing-masing.

Mencermati pengertian elit sebagaimana diungkap di atas, perlu juga kiranya disimak pendapat yang dikemukakan Lipset dan Solari, sebagaimana yang dikutip oleh Schoorl:

“...bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian elit ialah posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi-posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas” (J.W. Schoorl, 1980).

Dengan gambaran sebagaimana diungkapkan di atas, maka di masyarakat dapat ditemukan adanya sejumlah individu yang berperan sebagai elit pada salah satu cabang kehidupan tertentu. Akan tetapi yang bersangkutan, pada waktu yang bersamaan, tidak termasuk dalam jajaran elit pada cabang-cabang kehidupan lainnya. Sebagai misal, individu-individu tersebut dapat digolongkan sebagai elit di bidang ekonomi karena mereka dapat dinyatakan sebagai pengusaha yang berhasil; akan tetapi dalam waktu yang berbarengan mereka tidak termasuk dalam kelompok

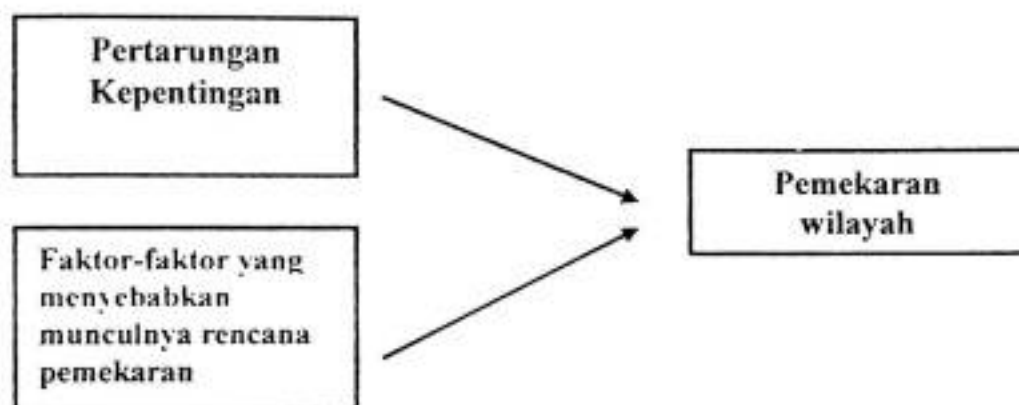
elit di bidang politik karena aktivitasnya di bidang kehidupan ini dapat dinyatakan relatif jarang dan tidak menonjol.

Sementara itu di masyarakat lainnya, tidak tertutup kemungkinan pula adanya sejumlah individu tertentu yang menjadi elit pada beberapa cabang kehidupan yang ada di masyarakat dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Oleh karena itu, dengan mengikuti contoh di atas, maka dimungkinkan pula adanya individu yang termasuk dalam kelompok elit di bidang ekonomi; dan pada tenggang waktu yang hampir bersamaan yang bersangkutan termasuk pula dalam kelompok elit di bidang politik (Haryanto, 2005). Hal ini dikarenakan individu tersebut selain sebagai pengusaha yang berhasil juga mampu memainkan peran dan mempunyai pengaruh yang relatif besar di bidang kehidupan politik. Dan pada realitasnya dewasa ini di Indonesia, banyak ditemui anggota dewan, pejabat eksekutif, dan tokoh partai politik yang berlatar belakang pengusaha.

F. Model Analisis

Berdasarkan definisi yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini, maka skema atau model analisis yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagan model analisis



G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pengertian dan memberi arah yang lebih jelas dalam penelitian ini, maka akan diberikan penjelasan yang bersifat operasional:

1. Pemekaran Wilayah

Pemekaran daerah/wilayah dalam penelitian ini adalah perubahan kedudukan kabupaten menjadi beberapa kekuasaan sosial politik, dalam hal ini Kabupaten Bone, yang sebelumnya di bawah satu kekuasaan administrasi-

pemerintahan menjadi beberapa kekuasaan administrasi-pemerintahan yang baru.

Beberapa indikator-indikator pemekaran :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
- c. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah.
- d. Percepatan pengelolaan potensi daerah.
- e. Peningkatan keamanan dan ketertiban.
- f. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

2. Pertarungan Kepentingan

Pertarungan kepentingan adalah suatu tindakan pertentangan atau perlawanan dua atau lebih posisi yang berbeda yang dialami seseorang (pertentangan internal berkenaan dengan motif, keinginan, usaha, dan nilai etis) atau yang terjadi antara beberapa pihak atau antar kelompok, negara, dan masyarakat lainnya untuk memperoleh suatu tujuan yang diinginkan.

Indikator-indikator pertarungan kepentingan:

1. Adanya kelompok pro pemekaran.
2. Adanya kelompok kontra pemekaran.

3. Faktor-faktor penyebab munculnya pemekaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua aspek yang mendukung terjadinya pemekaran suatu wilayah/daerah baik secara administratif maupun secara fisik.

Indikato-indikatornya adalah :

1. Sumber daya manusia;
2. Luas wilayah;
3. Sosial budaya;
5. Potensi ekonomi;
6. Jumlah penduduk;
7. Sumber daya alam.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara garis besar pada bab ini akan dijelaskan menyangkut 5 aspek pendukung dalam metodologi penelitian yang akan dilakukan. Adapun 5 aspek tersebut, yaitu : jenis penelitian, unit analisis, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang merujuk pada beberapa pendekatan metodologis yang didasarkan pada prinsip-prinsip teoritis tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sejumlah variabel-variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan secara tepat Analisis Politik rencana pemekaran di Kabupaten Bone.

B. Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan serta lembaga atau institusi terkait dan berkafabel dengan penelitian ini.

C. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Data Primer adalah data-data kualitatif yang diperoleh langsung dari lapangan, berupa catatan-catatan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara sejumlah informan.

Data sekunder adalah data-data penunjang untuk melengkapi hasil penelitian ataupun untuk memberikan gambaran secara jelas pada latar penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, literatur-literatur dan pengamatan langsung dilapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Mengacu pada pendapat diatas maka sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung secara lisan kepada responden yang ditunjuk untuk

mengungkap berbagai data dan informasi sesuai dengan pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini wawancara digunakan sebagai alat pengumpul data pembanding atau alat ukur kebenaran data utama untuk menguji kebenaran atau ketepatan serta ketelitian data utama yang telah dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan melalui wawancara adalah data utama untuk dijadikan sebagai data pembanding atau pengukur sehingga diharapkan dapat ditarik kesimpulan dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih tinggi. Sebagai alat pengumpul data pelengkap untuk melengkapi data atau informasi yang belum didapat melalui teknik dokumentasi maupun teknik wawancara utama sebagai upaya mengumpulkan data penunjang yang diperkirakan dapat digunakan untuk memperoleh dan menarik kesimpulan atau menjelaskan kesimpulan yang dirumuskan.

Adapun yang menjadi informan untuk memberikan data dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

Eksekutif

Pemerintah Kabupaten Bone, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.

Legislatif

Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Komisi A dalam hal ini bagian pemerintahan Kabupaten Bone.

Lembaga

Ketua Presidium Persiapan Pembentukan Kabupaten Bone Barat.

Tokoh Masyarakat

Tokoh pemuda Kecamatan yang berada di wilayah Bone bagian Barat.

b. Metode Dokumentasi

Data dokumentasi biasanya dipergunakan dalam penelitian sejarah, akan tetapi arti penting data dokumentasi sebagai sumber data yang diperlukan bagi setiap penelitian, maka dokumentasi tidak hanya dipergunakan bagi penelitian sejarah saja, tetapi juga dalam ilmu sosial.

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menunjang data primer atau data utama yang diperoleh dari informan. Teknik ini membantu peneliti dalam menelusuri pembahasan melalui tulisan-tulisan yang pernah ada tentang Otonomi Daerah khususnya pemekaran wilayah Dokumen-dokumen atau arsip-

arsip akan dikaji berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Study Literatur ini sangat berguna dalam penelitian untuk memperoleh gambaran tentang latar subjek penelitian, baik itu latar sosial, budaya maupun historis.

c. Metode Observasi

Metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan (Surachmad, 1982 :162). Dalam metode ini peneliti akan langsung datang di lokasi penelitian untuk mengamati, mencatat, wawancara dan diskusi dengan *Steakeholders*. Pemerintah Kabupaten Bone dan beberapa lembaga dan instansi.

E. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisa data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit dan memerlukan kerja keras, daya kreatif serta intelektual yang tinggi. Dengan demikian tidak ada satupun cara yang dapat dijadikan pegangan dalam menganalisa data yang terkumpul, untuk itu dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Dalam analisa kualitatif ini akan menggunakan teknik analisa perbandingan tetap. Dimana data-data yang telah dikumpulkan akan dibandingkan antara yang satu dengan yang lainnya dan kemudian secara tetap dibandingkan kategori yang satu dengan kategori yang lainnya, dengan demikian akan diperoleh klasifikasi data yang tetap.

Adapun tahapan yang ditempuh dalam proses analisis data tersebut antara lain:

1. *Reduksi Data*

- a. Identifikasi satuan Unit. Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian.
- b. Membuat Koding. Setelah satuan diperoleh langkah berikutnya membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap satuan, agar supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya dan berasal dari sumber mana.

2. *Kategorisasi*

- a. Menyusun kategorisasi dengan memilah-milah setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
- b. Setiap kategori diberi label.

3. *Sintetisasi*

- a. Mensintesa berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
- b. Kaitan kategori yang satu dengan kategori lainnya diberi label lagi.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kabupaten Bone

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur Propinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. Mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan kearah utaa. Secara astronomis letak dalam posisi 4° 13'- 506' Lintang Selatan dan antara 119° 42'-120° 40' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru.

Ibukota Kabupaten Bone adalah Watampone. Luas wilayah Kabupaten Bone 4. 559 km² dengan rincian lahan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| • Persawahan | : 88.449 Ha |
| • Tegalan/ Ladang | : 120. 524 Ha |
| • Tambak/ Empang | : 11. 148 Ha |
| • Perkebunan Negara/ Swasta | : 43. 052, 97 Ha |
| • Hutan | : 145. 073 Ha |
| • Padang rumput dan lainnya | : 10. 503, 48 Ha |

B. Struktur Pemerintahan

Secara administrasi Kabupaten Bone terdiri atas 27 Kecamatan dan 333 desa dan 39 kelurahan, 893 Dusun dan 121 lingkungan, dimana Kabupaten Bone merupakan pusat pengembangan wilayah timur Sulawesi Selatan. Sistem Pemerintah Daerah yang telah mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati Bone dalam mengemban tugas, pemerintahan dan pembangunan dibantu oleh perangkat Daerah dan lembaga teknis yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya terdiri dari :

Terdiri dari Dinas meliputi :

1. Dinas Tanaman Pangan
2. Dinas Peternakan
3. Dinas Perikanan dan Kelautan
4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
5. Dinas Pekerjaan Umum
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Perindak, Penanaman Modal dan Pertambangan
9. Dinas Koperasi dan PKM
10. Dinas Pendapatan Daerah
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan
12. Dinas Perhubungan

Lembaga teknis daerah terdiri dari :

Meliputi 6 Badan dan 6 Kantor :

1. Bappeda
2. Badan Pengawas Daerah
3. Bapedalda
4. Badan Pembinaan Kesatuan Bangsa, Linmas dan Trantib
5. Badan Pengelola Perkotaan
6. Badan Kepegawaian Daerah

Kantor Terdiri dari :

1. Kantor Rumah Sakit Tenriawaru
2. Kantor Tenaga Kerja
3. Kantor Informasi dan Komunikasi
4. Kantor Sosial
5. Kantor Pariwisata
6. Kantor Litbangda

Tabel 1. 1**Rencana Pembagian Wilayah Kabupaten Bone Barat**

NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN	DUSUN	LINGKUNGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PONRE	9	-	38	-
2	LAPPARIAJA	9	-	25	-
3	LAMURU	11	1	29	2
4	TELLU LIMPOE	11	-	24	-
5	BENGO	9	-	25	-
6	ULAWENG	14	1	38	2
7	PALAKKA	15	-	38	-
TOTAL		78	2	217	4

Sumber : *Bone Dalam Angka 2006*

C. Karakteristik

Terdiri dari 3 dimensi yaitu :

1. Wilayah pegunungan dengan ketinggian antara 150 – 300 m dari permukaan laut
2. Wilayah dataran rendah
3. Wilayah pantai

Adapun jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari tanah Aluvial, Geilumus, Litosol, Redosol, Grumosol, Mediteran dan Renzina, jenis tanah di dominasi oleh Mediteran seluas 67, 6 % dari total wilayah, kemudian Renzina 9, 596 % dan Litosol 19 %.

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang kelembaban udara berkisar antara 95 – 99 % dengan temperatur berkisar 260 C – 430 C. Pada periode April – September bertiup angin timur yang membawa hujan, sebaliknya pada bulan Oktober – Maret bertiup angin barat, dimana pada waktu itu Kabupaten Bone mengalami musim kemarau.

Disamping kedua sektor yang terkait dengan iklim tersebut di atas, terdapat juga sektor peralihan yaitu Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian wilayahnya mengikuti sektor barat dan sebagian lagi mengikuti sektor timur. Rata-rata curah hujan di wilayah Bone bervariasi yaitu :

- Rata - rata 1. 750 mm
- Rata - rata 1. 750 mm – 2. 000 mm
- Rata - rata 2.500 mm – 3. 000 mm

Adapun kelembaban udara di Kabupaten Bone Tahun 2006, rata – rata penyinaran matahari di Kabupaten Bone Tahun 2006 suhu udara minimum (0°C) dan jumlah hari hujan di Kabupaten Bone Tahun 2006.

D. Sejarah Kabupaten Bone

Sejarah mencatat bahwa Bone merupakan salah satu kerajaan besar di nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone yang dalam catatan sejarah didirikan oleh ManurungngE Rimatajang pada tahun 1330, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Latenritatta Towappatunru Daeng Serang Datu Mario Riwawo Aru Palakka Malampee Gemmekna Petta Torisompae Matinroe ri Bontoala, pertengahan abad ke-17 (A. Sultan Kasim,2002). Kebesaran kerajaan Bone tersebut dapat memberi pelajaran dan hikmah yang memadai bagi masyarakat Bone saat ini dalam rangka menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya masyarakat Bone dalam upaya menata kehidupan kearah yang lebih baik.

Ketiga hal yang dimaksud adalah

Pertama, pelajaran dan hikmah dalam bidang politik dan tata pemerintahan. Dalam hubungannya dalam bidang ini, sistem kerajaan

Bone pada masa lalu saat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau dalam terminologi politik modern dikenal dengan istilah demokrasi. Ini dibuktikan dengan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat melalui lembaga merkadu dalam dewan adat yang disebut " ade pitue ", yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasehat raja. Segala sesuatunya yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarakan oleh " ade pitue " dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja untuk dilaksanakan.

Selain itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat mengedepankan asas kemanusiaan dan musyawarah. Prinsip ini berasal dari kesan Kajaolaliddong seorang cerdik cendikia Bone yang hidup pada Tahun 1507 – 1586 yang pernah disampaikan kepada raja Bone seperti yang dikemukakan oleh Wiwiek P. Yoesoep (1982 : 10) bahwa terdapat empat faktor yang membesarkan kerajaan yaitu :

- ❖ Seuwani, Temmatinroi matanna Arung Mangkaue mitai murinna gaue (Mata Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan).
- ❖ Maduanna, Maccapi Arung Mangkaue duppai ada' (Raja harus pintar menjawab kata- kata).
- ❖ Matellu, Maccapi Arung Mangkaue mpinru ada' (Raja harus pintar membuat kata- kata atau jawaban).

- ❖ Maeppa'na, Tettakalupai surona mpawa ada tongeng (Duta tidak lupa menyampaikan kata- kata yang benar).

Pesan Kajaolaliddong ini antara lain data diinterpretasikan kedalam pemaknaan yang mendalam bagi seorang raja betapa pentingnya perasaan, pikiran dan kehendak rakyat dipahami dan disikapi.

Kedua, yang menjadi pelajaran dan hikmah dari sejarah Bone terletak pada pandangan yang meletakkan kerjasama dengan daerah lain, dan pendekatan diplomasi sebagai bagian penting dari usaha membangun negeri agar menjadi lebih baik.

Urgensi terhadap pandangan seperti itu tampak jelas ketika kita menelusuri puncak- puncak kejayaan Bone pada masa lalu. Dan sebagai bentuk monumental dari pandangan ini dikenai dalam sejarah akan perjanjian dan ikrar bersama kerajaan Bone, Wajo dan Soppeng yang melahirkan Tellum Poccoe atau dengan sebutan lain " LaMumpatue Ri Timurung " yang dimaksudkan upaya memperkuat posisi kerajaan dalam menghadapi tantangan dari luar.

Ketiga, pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari sejarah kerajaan Bone adalah warisan budaya kaya dengan pesan. Pesan kemanusiaan yang mencerminkan kecerdasan manusia Bone pada masa lalu.

Banyak referensi yang bisa dipetik dari sari pati ajaran Islam dalam menghadapi kehidupan, dalam menjawab tantangan pembangunan dan dalam menghadapi perubahan- perubahan yang semakin cepat. Namun yang terpenting bahwa semangat religiusitas orang Bone dapat menjawab perkembangan zaman dalam segala bentuk perubahan dan dinamika. Demikian halnya (Kabupaten Bone) potensi besar yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan bagi pembangunan demi kemakmuran rakyat. Potensi itu cukup beragam seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata dan potensi lainnya. Demikian masyarakatnya dengan berbagai latar belakang pengalaman dan pendidikan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan Bone itu sendiri. Walaupun Bone memiliki warisan sejarah dan budaya yang cukup memadai, potensi sumber daya alam serta dukungan sumber daya manusia, namun patut digaris bawahi jika saat ini dan untuk perkembangan ke depan Bone akan berhadapan dengan berbagai perubahan dan tantangan pembangunan yang cukup berat. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran, gagasan dan perencanaan yang tepat dalam mengorganisir warisan sejarah, kekayaan budaya dan potensi yang dimiliki ke dalam suatu pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

E. Visi dan Misi Kabupaten Bone

Visi

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BONE YANG MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS DAN BARADAB “

Misi Pembangunan

Untuk mewujudkan visi daerah ke depan dengan ciri kondisi kehidupan yang diinginkan, ditetapkan misi sebagai berikut :

Penegakan ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berlandaskan nilai- nilai dan etika lingkungan dalam rangka pelestarian Sumber Daya Alam bagi pembangunan berkelanjutan.

F. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Kabupaten Bone, sebagaimana Masyarakat kabupaten lainnya di Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, merupakan pemeluk Agama Islam yang taat, kehidupan mereka selalu diwarnai oleh keadaan yang serba religius. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah dan Pendidikan Agama Islam.

Sekalipun demikian Penduduk Kabupaten Bone yang mayoritas pemeluk agama Islam, tetapi di kota Watampone juga ada Gereja dalam arti pemeluk agama lain cukup leluasa untuk menunaikan Ibadahnya.

Keadaan ini memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan keagamaan karena mereka saling hormat menghormati dan menghargai satu dengan lainnya.

Disamping itu peran pemuka agama terutama para alim ulama sangat dominan dalam kehidupan keagamaan bahkan alim ulama merupakan figur kharismatik yang menjadi panutan masyarakat.

Dibidang pendidikan, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional maka Pemkab Bone untuk sektor pendidikan diarahkan pada upaya peningkatan mutu pendidikan, dalam hal ini diharapkan pula adanya peningkatan relevansi pendidikan serta mempunyai keterkaitan yang sesuai dengan kebutuhan tuntutan. Oleh karena itu mutu pendidikan selalu ditingkatkan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia agar menguasai Iptek. Peningkatan sumber daya manusia tersebut mempunyai nilai strategis karena merupakan prasyarat mutlak bagi Daerah Kabupaten Bone untuk mampu bersaing dalam Era Otonomi Daerah ini.

Sedangkan mengenai pengembangan Kebudayaan Pemkab Bone telah berupaya untuk membina nilai-nilai budaya daerah sebagai unsur budaya nasional dengan berdasarkan pada penerapan nilai-nilai kepribadian bangsa.

Dibidang Kesehatan dan Kependudukan Pemkab Bone telah berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat termasuk keadaan gizi dalam rangka peningkatan kualitas dan taraf hidup serta kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu Pemkab Bone telah memperluas pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara lebih merata ke pelosok desa.

G. Potensi Wilayah

1. Industri dan Perdagangan

Komoditi unggulan ekspor Kabupaten Bone antara lain : udang, ikan tuna, etil alkohol, rumput laut, kepiting bakau dan berbagai hasil bumi dan laut lainnya.

Potensi investasi di sektor industri dapat digunakan sebagai berikut :

- a) Berbagai jenis industri kecil dan kerajinan yang ada dan sangat potensial untuk dikembangkan, seperti :

Industri Pengolahan Bahan Pangan, Industri Kimia Agro Non Pangan dan Hasil Hutan, Industri Logam Mesin dan Elektronika, Industri Sandang Kulit dan Aneka dengan komoditi seperti : Berbagai jenis makanan/minuman, Kerajinan Anyaman, Hasil Tenunan Sutra, Kuningan/Perak, Pakaian Adat, Pengantin/Penari, Pelaminan, Pakaian Jadi dan Songko to Bone dsb.

- b) Jenis industri Pengolahan hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan dan bahan galian, antara lain :

Pabrik Gula 2 buah, Cold Storage 4 buah, Pabrik Alkohol Spiritus 1 buah, Pabrik Es batu 8 buah, Penggeregajian Kayu 7 buah, Industri Barang Plastik 1 buah, dsb.

Peluang Investasi

- a) Industri ikan kaleng di Kecamatan Tanete Riattang Timur.
- b) Industri Air Minum dalam Kemasan di Kecamatan Kajuara, Barebbo, Ulaweng, Amali dan Tellu Seatinge.
- c) Industri Bumbu Masak dari Molasis di Kecamatan Cina dan Kecamatan Libureng
- d) Industri pengolahan Marmer di Kecamatan Bontocani.
- e) Srana Pergudangan di Pelabuhan Bajoe.
- f) Pembangunan prasarana pasar.

2. Pertambangan dan Energi

Prospek investasi pada sektor Pertambangan sangat besar dengan jenis bahan tambang antara lain :

- a. Emas

Terdapat di Desa Talabangi Kecamatan Patimpeng, Desa Langi Kecamatan Bontocani.

b. Batu Bara

Terdapat di Desa Nusa Kecamatan Kahu, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja dan Kecamatan Ponre.

c. Tembaga, Bauksit, Timbal dan Seng

Terdapat di Kecamatan Patimpeng, Bontocani, Libureng, Salomekko dan Ponre.

d. Biji Mangan

Terdapat di Desa Mappesangka Kecamatan Ponre, Desa Langi Kecamatan Bontocani.

e. Marmer, Batu Sabak

Terdapat di Desa Watangceni Kecamatan Bontocani, Libureng, dan Kahu.

f. Biji Besi

Terdapat di Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani.

g. Pasir Kwarsa

Terdapat di Desa Nusa Kecamatan Kahu, Desa Lemo Kecamatan Kajuara, Lamuru, Lappariaja, Libureng, Bontocani dan Ponre.

Peluang Investasi

- A) Pertambangan Emas di Kecamatan Patimpeng.
- B) Pertambangan Marmer di Kecamatan Bontocani.
- C) Pertambangan Batu Bara di Kecamatan Lamuru, Lappariaja, Kahu dan Ponre.

3. Pertanian, Kehutanan dan Tanaman Pangan

Pertanian

Pertanian, Tanaman Pangan

Potensi Pertanian Tanaman Pangan cukup besar dengan luas persawahan 88. 449 Ha tersebar pada 27 Kecamatan, terdiri dari :

- Irigasi Teknis : 17. 415 Ha
- Irigasi Desa : 23. 711 Ha
- Tadah Hujan : 46. 433 Ha
- Pasang Surut : 690 Ha

Hasil Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2006 :

1. Padi : luas panen 111. 168 Ha dan hasil produksi 517. 535 ton

2. Palawija

- Jagung : luas penanaman 41. 149 Ha dan hasil produksi 106. 321 ton
- Ubi Kayu : luas panen 765 Ha dan hasil produksi 108. 455 ton.
- Ubi Jalar : luas panen 600 Ha dan hasil produksi 5. 581 ton.
- Kacang Tanah : luas panen 10. 832 Ha dan hasil produksi 13. 906 ton
- Kedele : luas panen 5.775 Ha dan hasil produksi 8. 760 ton
- Kacang Hijau : luas panen 10. 732 Ha dan hasil produksi 13. 759 ton
- Pisang : luas panen 956. 936 pohon dan hasil produksi 179. 126 kwintal
- Sukun : jumlah panen 75. 004 pohon dan hasil produksi 31. 859 kwintal

Perkebunan dan Kehutanan

Potensi Perkebunan dan Kehutanan sangat besar dengan berbagai komoditi tanaman industri dengan luas lahan perkebunan dan kehutanan 433. 184 Ha terdiri dari : Lahan Perkebunan 128. 377 Ha dan lahan Kehutanan 176. 430 Ha.

Hasil- hasil perkebunan dan kehutanan Tahun 2006 antara lain :

- Kelapa : luas panen 16. 800 Ha dan hasil produksi 12. 811 ton
- Cokelat : luas panen 25. 233 Ha dan hasil produksi 15. 834 ton
- Cengkeh : luas panen 3. 644 Ha dan hasil produksi 2. 263 ton
- Jambu Mete : luas panen 9. 800 Ha dan hasil produksi 2. 754 ton
- Kemiri : luas panen 9. 104 Ha dan hasil produksi 6. 523 ton
- Tebu Rakyat (TRI) : luas panen 6. 654 Ha dan hasil produksi 245. 338 ton

Peluang Investasi

- Perkebunan Kelapa Sawit terdapat di Kecamatan Palakka, Amali, Ulaweng, Ajangale, Duo Boccoe, Tellu Siattinge dan Cenrana.
- Perkebunan Vanili terdapat di Kecamatan Bontocani, Kahu, Kajuara, Tellu Limpoe dan Lamuru.
- Penyadapan Getah Pinus terdapat di Kecamatan Bontocani, Tellu Limpoe, Ponre, Lappariaja dan Bengo.
- Pengolahan Rotan terdapat di Kecamatan Bontocani, Ponre dan Tellu Limpoe.

Perikanan

Potensi di bidang perikanan sangat besar terutama pada 11 Kecamatan di sepanjang pesisir Teluk Bone.

Wilayah pensangkapan ikan disekitar Teluk Bone dengan panjang pantai 127 km sampai 10 mil ketengah laut dengan produksi Tahun 2006 sebesar 68. 384, 2 ton, Perairan umum sebesar 859, 5 ton, Rawa/kolam/empang dan sungai dengan areal seluas 1. 824 Ha dengan produksi 12. 407, 1 ton.

- Udang : luas areal budi daya 4. 089 Ha dengan jumlah produksi 4. 318 ton
- Kepiting Bakau : luas areal budi daya 2. 189 Ha dengan jumlah produksi 2. 061 ton
- Bandeng : luas areal budi daya 3 520 Ha dengan jumlah produksi 4. 964 ton
- Rumput Laut : luas areal budi daya 1. 145 Ha dengan jumlah produksi 3. 821, 5 ton
- Produksi Perikanan Laut/Perairan Umum sebesar 73.763, 5 ton ikan campuran yang sebahagian besar ikan tuna

Peluang Investasi

- Pengembangan udang sitto, udang galah dan kepiting bakau di Kecamatan Cenrana Tellu Siattinge, Awangpone, Tonra, Salomekko, Sibulue dan Kajuara.
- Budidaya rumput laut di sepanjang pantai dan pesisir Teluk Bone.
- Pengolahan/pengawetan ikan dan biota perairan lainnya.
- Sarana penunjang (Pembenihan ikan/udang).

Peternakan

Jenis ternak yang dikembangkan di Kabupaten Bone meliputi : Sapi, Kerbau, Kambing, Ayam Pedaging, Ayam petelur, Ayam Buras dan Itik.

Adapun potensi/populasi Tahun 2006, sebagai berikut :

- Sapi : 105. 514 ekor
- Kerbau : 5. 776 ekor
- Kuda : 13. 006 ekor
- Kambing : 11. 127 ekor
- Ayam Ras petelur : 33. 000 ekor
- Ayam Ras pedaging : 37.000 ekor
- Ayam Buras : 11. 892, 19 ekor
- Itik : 91. 061 ekor

Peluang Investasi

- Usaha Penggemukan Sapi di Kecamatan Libureng, Lappariaja, Kahu, Ponre, dsb.
- Pengembangan Kambing di Kecamatan Tonra, Mare, Salomekko, Petimpeng, Kahu dan Libureng.
- Industri Pakan Ternak.

H. Pariwisata

Potensi obyek wisata di Kabupaten Bone antara lain :

a. Wisata Budaya

- Rumah Adat Bugis (Bola Soba) di Watampone
- Museum Saoraja Lapawawoi Kr. Sigeri di Watampone
- Makam Raja- raja Bone di Bukaka Watampone
- Makam Raja- raja di Lalebata Lamuru

b. Wisata Alam Besejarah

- Goa Mampu di Desa Cabbeng di Kecamatan Dua Boccoe
- Goa Janci di Desa Mallari di Kecamatan Awangpone
- Tempat Peraduan Arung Palakka dalam Goa di Kecamatan Awangpone

c. Obyek Wisata Alam

- Tanjung Pallette di Kecamatan Tanete Riattang Timur
- Desa Gareccing di Kecamatan Tonra
- Pantai Cappa Ujung di Kecamatan Sibulue
- Permandian Bonto Jai di Kecamatan Bontocani
- Permandian Alinge di Kecamatan Ulaweng
- Permandian Lanca di Kecamatan Tellu Siattinge
- Air Panas Saweng di Kecamatan Ponre

- Bendungan Salomekko di Kecamatan Salomekko
- Taretta di Kecamatan Amali

I. Penduduk dan Tenaga Kerja

1. Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bone dari Tahun 2001 s/d Tahun 2005 mengalami peningkatan yang cukup berarti Tahun 2001 sebesar 655. 091 jiwa, Tahun 2002 sebanyak 659. 820 jiwa, Tahun 2003 sebesar 685. 590 jiwa, Tahun 2004 sebanyak 688. 080 jiwa dan Tahun 2005 sebanyak 694. 311 jiwa; dengan tingkat kepadatan penduduk rata- rata sebesar 150, 93 jiwa/km². Pertumbuhan penduduk selama periode Tahun 2001 s/d 2005 mencapai rata- rata 1, 06 % pertahun.

2. Penduduk Berdasarkan Lapangan Kerja

Jumlah tenaga kerja pada Tahun 2005 sebanyak 319. 620 jiwa yang terserap diberbagai lapangan usaha yang didominasi pada lapangan usaha pertanian secara luas sebesar 168. 030 jiwa atau 63, 73 %, menyusul perdagangan sebesar 13, 60 %, dan jasa- jasa sebesar 10, 73 %.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas Responden

Penelitian tentang rencana pemekaran di Kabupaten Bone mengambil sampel di Kabupaten Bone yang menjangkang 8 (delapan) orang informan yang dianggap kapabel dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Indikator kapabilitas dari informan yang terjaring, terlihat pada keragaman yang ada pada tiap responden. Jumlah tersebut juga disebabkan oleh karena terbatasnya waktu dan dana untuk penelitian ini. Kedelapan informan tersebut dirinci sebagai berikut :

1. **H. A. Muh. Idris Galigo**, adalah Bupati Kabupaten Bone.
2. **A. Amrullah, SH, MA**, adalah Sekda Kabupaten Bone.
3. **A. Muskamal Bare**, adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone.
4. **Muh. Amin**, adalah Sekretaris Komisi A Kabupaten Bone.
5. **Drs. H. Hamid Paddu, MA**, adalah Ketua Presidium FPK-BB.
6. **H. Muh. Yusuf**, adalah masyarakat di Kabupaten Bone.
7. **Ir. Jusman A. Rahim**, adalah tokoh pemuda di Kecamatan Lappariaja.
8. **Mustamin**, masyarakat di Kecamatan Bengo di Kabupaten Bone.

Dalam bab ini akan membahas mengenai pemekaran Kabupaten Bone yang tampaknya semakin menjadi perhatian berbagai kalangan termasuk akademisi baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar Kabupaten Bone. Untuk menggambarkan adanya pertarungan kepentingan yang terjadi di awal munculnya rencana pembentukan Kabupaten Bone yang melibatkan hampir seluruh elemen yang berada dalam wilayah tersebut. Selain itu, adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya rencana pembentukan Kabupaten Bone Barat yang nantinya akan menentukan layak atau tidaknya pemekaran itu dilakukan.

A. Pertarungan kepentingan rencana pemekaran Kabupaten Bone

Dalam hal pemekaran wilayah, terdapat gambaran nilai positif apabila Kabupaten Bone dimekarkan. Misalnya, dari segi sumber daya alam dan manusia, terungkap bahwa Bone sudah sangat layak untuk dimekarkan, terlebih lagi jika ditinjau dari luas wilayahnya. Tetapi, disamping itu pula akan terdapat suatu kemunduran dalam sebuah pemekaran ditinjau dari persoalan budayanya, yang nantinya akan terjadi perpecahan. Karena adanya anggapan dari masyarakat bahwa ketika Bone dimekarkan, wilayah yang memisahkan diri akan memiliki budaya lain. Dari gambaran singkat di atas ini menunjukkan betapa kentalnya pertarungan kepentingan yang terjadi sehubungan dengan masalah tersebut.

Beberapa waktu lalu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bone menggelar seminar tentang pemekaran itu. Dalam seminar sehari itu terungkap bahwa ada beberapa kalangan yang berbeda pendapat. Ada yang setuju, ada pula yang menolak Kabupaten Bone dimekarkan, ini sedikitnya menggambarkan betapa kentalnya pertarungan kepentingan yang terjadi sehubungan dengan masalah tersebut. Seminar tersebut menghadirkan empat pemateri, yakni: Anwar Ibrahim, Lauddin Marsuni, Ambo Dalle, dan Mansyur Ramly. Kegiatan itu dihadiri sekitar 400 peserta. Para peserta yang hadir dalam seminar itu antara lain; Kepala Desa, Partai Politik, Camat, Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat. Terjadinya pro dan kontra antara peserta seminar, khususnya kades, karena persoalan sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik. Ada peserta yang tidak setuju dilakukan pemekaran dengan melihat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih belum dikelola maksimal dan ada pula yang mengatakan, tidak selayaknya dimekarkan karena persoalan budaya, disamping itu ada juga yang berpendapat, Kabupaten Bone memang layak untuk dimekarkan. Dalam seminar itu juga berkembang mengenai rencana pemekaran Bone Barat. Bahkan di kalangan peserta, banyak yang melihat Bone Barat lebih siap melakukan pemekaran ketimbang Bone bagian lain.

Kalangan akademisi berharap agar wacana pemekaran Bone dapat disikapi secara substansial dan menerjemahkan tuntutan masyarakat secara bijak. Sehingga wacana pemekaran dapat diorientasikan pada

sebuah titik klimaks, yang menyimpulkan apakah pemekaran itu adalah tuntutan rakyat, atau hanya keinginan elite politik. (*"Kades Beda Pendapat soal Pemekaran Bone"*, Fajar, 07 Mei 2006)

A. 1. Kelompok Pro Pemekaran

Dalam upaya menelaah rencana pemekaran Kabupaten Bone, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam rencana pemekaran Kabupaten Bone Barat, yaitu keikutsertaan mereka dalam pemberian suara. Penulis juga menambahkan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang mendasari layak atau tidaknya Kabupaten Bone untuk dimekarkan. Yang nantinya akan mempengaruhi aktifitas politiknya.

Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap beberapa responden diketahui bahwa mereka mempunyai tingkat pengetahuan dan kepedulian terhadap adanya rencana pemekaran Kabupaten Bone Barat. Salah seorang tokoh pemuda di Kec. Lappariaja, Ir. Jusman A. Rahim, mengemukakan bahwa adanya suatu indikasi bahwa Pansus Kabupaten Bone dan anggota DPRD Bone semakin aspiratif. Yang nantinya, apabila Kabupaten Bone Barat terbentuk, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya akan lebih cepat meningkat dibandingkan tetap seperti sekarang. Alasannya adalah jarak antara pusat pemerintahan dan perdagangan semakin dekat, sehingga urusan perijinan dan pemasaran hasil alam yang dimilikinya bisa lebih cepat.

"Saya sangat bersyukur dengan terbentuknya Pansus Pemekaran Bone karena saya berharap pansus tidak semata-mata hanya melakukan misi pansus. Tapi mereka dapat terlebih dahulu merumuskan program pansus, mengenai apa yang perlu dilakukan dan ditindaklanjuti". (Wawancara, 2007)

Sementara itu, wakil ketua DPRD Bone, A. Muskamal Bare mengungkapkan bahwa rencana pemekaran wilayah yang terus berembus dalam era otonomi daerah ini, harus benar-benar diarahkan demi mendekatkan fungsi pelayanan birokrasi pemerintahan daerah terhadap rakyatnya. Tanpa hal itu, persepsi yang mengaitkan wacana pemekaran wilayah sekadar euforia otonomi yang semata terkait dengan logika kekuasaan, akan semakin menguat. Namun demikian, wacana pemekaran lebih diarahkan untuk memenuhi keinginan dan ambisi birokrat dan politisi

"Saya sangat setuju, apabila tujuannya untuk pemerataan pelayanan kepada masyarakat, karena hal itu dapat memperkuat kecamatan sebagai pusat pelayanan. Selain itu, dapat pula dilakukan penguatan pada desa-desa yang sudah ada". (Wawancara, 2007)

Pada kesempatan yang lain, Drs. H. Hamid Paddu, MA berpendapat bahwa pemekaran wilayah justru akan memperkuat 'assitobonengeng' (keutuhan masyarakat Bone) yang tidak dibatasi oleh persoalan wilayah administratif.

"Jadi kalau ada yang bilang bahwa pemekaran akan mengakibatkan perpecahan, saya kira sebuah anggapan yang keliru. Begitu juga, rencana pemekaran ini bukan karena Bone Barat tertinggal dibanding wilayah lain di Bone, tapi semata-mata karena ada peluang yang diberikan oleh konstitusi dan itu tidak

boleh disia-siakan demi kemajuan bersama masyarakat Bone dalam arti luas". (Wawancara, 2007)

A. 2. Kelompok Kontra Pemekaran

Rencana pemekaran Kabupaten Bone perlu dikaji secara serius dan komprehensif, karena ada kekhawatiran usul rencana pemekaran tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan atau kepentingan masyarakat Bone, melainkan semata-mata didasarkan atas alasan subjektif dari orang-orang yang menghendaki dan berharap untuk mendapat posisi pada kabupaten hasil pemekaran nanti. Saat ini sudah santer terdengar adanya orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menduduki kursi nomor satu di kabupaten yang baru dimekarkan nanti. Perlu diingat bahwa pemekaran bukan satu-satunya cara untuk mensejahterakan Kabupaten Bone dan tidak sedikit daerah yang telah dimekarkan malah menjadikan masyarakatnya semakin menderita, bahkan terjadi konflik antar warga. Maka dari itu, bukan hal yang mudah sebab ini sangat menentukan nasib banyak orang.

Hal ini didukung oleh pendapat salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Bone, H. Muh. Yusuf berpendapat bahwa dalam pemekaran Bone tidak mesti dilakukan kalau hanya berpendapat untuk mensejahterakan rakyat. Tapi yang perlu dilakukan adalah adanya pemerataan pembangunan di kota, kecamatan, dan desa. Sehingga

dengan pemerataan pembangunan tersebut masyarakat akan lebih mudah melakukan usaha dan akses ekonomi.

Hal yang sama dikemukakan oleh Sekda Kabupaten Bone, A. Amrullah, SH, MA, berpendapat bahwa setiap usulan mengenai pemekaran wilayah atau pembentukan kabupaten/kota baru di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk pembentukan Kabupaten Bone Barat harus benar-benar merupakan komitmen mayoritas warga, bukan semata itikad di tingkat elite.

"Jangan sampai setiap upaya pemekaran wilayah, justru memunculkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang akhirnya dibagi dua". (Wawancara, 2007)

Pada musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas), Mendagri menegaskan sejak otonomi daerah digulirkan, pemekaran wilayah di seluruh Indonesia sudah mencapai sekitar 79 pemekaran. Setelah dilakukan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang baru itu, kebanyakan hasilnya tidak memuaskan atau kinerjanya lamban. Sambil menunggu hasil-hasil pengkajian Depdagri itu, diputuskan usulan mengenai pemekaran akan selalu dipertimbangkan dengan matang, agar ketakutan-ketakutan tersebut tidak terjadi.

Ditanya ada kemungkinan pemprov juga membentuk semacam konsorsium untuk melakukan pengkajian, menurut Bupati Kab. Bone, H. A. Muh. Idris Galigo mengatakan :

"Bisa saja kalau berkas dari Kabupaten Bone sudah diterima. Kalau kemudian ternyata diperlukan, bisa saja ada tim untuk kembali mengkaji. Namun, yang harus lebih diperhatikan sebetulnya jangan sampai pembentukan wilayah baru itu justru mendikotomikan dua daerah yang ada". (*Wawancara, 2007*)

Beliau memberi contoh, Kabupaten dan Kota Luwu yang setelah dibagi empat, justru mengalami penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Setelah dibagi empat, PAD-nya juga harus dibagi dan ternyata jumlahnya jadi kecil. Hal itu bisa dikaitkan dengan upaya untuk mendorong kesejahteraan bagi seluruh warga.

Dalam kesempatan yang lain, masyarakat di Kecamatan Bengo mengemukakan ketidaksetujuannya dilakukan pemekaran karena melihat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih belum dikelola maksimal dan tidak selayaknya dimekarkan karena persoalan budaya, melihat ketakutan masyarakat apabila daerah tersebut dimekarkan maka akan terjadi pemisahan kultur budaya (*wawancara, 2007*). Disini dapat terlihat bahwa adanya ketidaksetujuan sebagian masyarakat di Kabupaten Bone, khususnya Bone bagian Barat apabila nantinya pemekaran itu terjadi. Mereka takut akan terjadi perpecahan pada masyarakat Bone karena mereka menganggap bahwa budaya mereka akan menjadi terpecah-pecah dan tidak akan menjadi satu kesatuan lagi.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya rencana pemekaran Kabupaten Bone

Ada persyaratan atau variabel untuk mengukur kelayakan pemekaran wilayah, ada lima faktor yang mendukung munculnya isu pemekaran Bone Barat yakni sumber daya manusia, luas wilayah dan budaya, potensi ekonomi, jumlah penduduk dan sumber daya alam, yang semuanya memiliki skor tertentu. Namun demikian, pengembangan wilayah yang menjadi wacana populer pascaotonomi selayaknya diukur dari kendali pelayanan birokrasi pemerintahan. Seharusnya ukurannya adalah mempersempit kendali pelayanan, sehingga akan tercipta kualitas pelayanan yang semakin baik. Meskipun, untuk mencapai kualitas tinggi itu tidak harus selalu dengan pengembangan wilayah.

B. 1. Sumber Daya Manusia

Kabupaten Bone sudah waktunya untuk mengadakan pemekaran karena sumber daya manusianya yang memenuhi standar apa lagi kalau ditinjau dari tingkat pendidikan, sudah banyaknya lulusan sarjana yang cukup memadai. Selain itu diperlukan juga adalah penambahan unit-unit pelayanan teknis di daerah-daerah yang tempatnya jauh dari pusat pelayanan di kabupaten. Disamping itu untuk memberdayakan sumber daya manusianya sudah sebanding dengan jumlah penduduk yang ada sehingga memungkinkan untuk diadakan pemekaran wilayah. Ini sejalan dengan pernyataan salah satu responden, Sekretaris Komisi A, Muh. Amin :

"Dengan adanya variabel penunjang atau syarat pemekaran, Kabupaten Bone sudah layak untuk dimekarkan. Ini ditunjang dengan salah satu variabel kependudukan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, ini ditandai dengan tingkat pendidikan dan memiliki lulusan sarjana yang memadai sampai pada proses pertanian yang dilakukan dengan cara modern". (Wawancara, 2007)

Dari segi lain, masyarakat Bone mempunyai potensi yang besar. Banyak generasi muda yang mempunyai potensi apabila diberikan tanggung jawab untuk menjalankan suatu roda pemerintahan di suatu wilayah, ini yang kemudian akan menjadi persoalan politis. Disamping luas wilayah, persoalan politis juga merupakan salah satu persoalan yang ada. Banyak masyarakat Bone bagian Barat yang mempunyai budaya yang berbeda dengan wilayah Bone lainnya, tetapi mereka mempunyai kemampuan memimpin. Pada intinya ini semua untuk kesejahteraan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

B. 2. Luas Wilayah dan Budaya

Beberapa waktu yang lalu pemekaran ditingkat desa itu telah dilakukan, jadi sudah 300 lebih desa dengan 27 kecamatan. Pada tingkat kabupaten, berbicara tentang pemekaran wilayah adalah merupakan hal tepat, karena hal itu mengatur tentang daerah besar dan kecil. Misalnya, wilayah sempit yang diatur minimal akan ada harapan akan perkembangan yang lebih baik. Sebuah wilayah yang besar perkembangannya terkadang sulit untuk mengaturnya, cuma persoalannya ditinjau dari segi budaya. Di Kabupaten Bone berbicara

tentang pemisahan, terkadang orang Bone tidak ingin memisahkan diri. Jadi, orang Bone selalu merasa bahwa Bone itu satu. Maka, ketika ada wacana pemekaran, itu dianggap sebagai perpecahan. Hal itu adalah sebuah kultur yang terus akan ada. Tetapi beberapa waktu lalu di tingkat akademisi termasuk mahasiswa gencar untuk melakukan pemekaran, terlebih dilihat dari faktor luas wilayah yang sangat memungkinkan untuk melakukan pemekaran.

B. 3. Potensi Ekonomi

Keefektifan pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Bone, dilihat dari aspek ekonominya. Dapat dikatakan bahwa suatu daerah itu tergantung manajemen pemerintahan daerah yang diterapkan, dengan melihat kedekatan pelayanan yang diukur dari sudut kedekatan tempat. Ada orang yang berdekatan tapi tidak memiliki ketersambungan manajemen untuk melayani. Tetapi yang dimaksud disini adalah kedekatan pelayanan. Sejauhmana manajemen yang diterapkan oleh pemerintah bisa memberi kemudahan-kemudahan bagi struktur yang ada dibawahnya. Misalnya kewenangan pemerintah yang tertinggi didaerah itu bisa dialihkan pada pemerintahan yang ada dibawah dalam rangka memudahkan masyarakat mengkoordinasikan urusan-urusan tersebut. Jadi, tidak mesti dilakukan penukaran. Akan tetapi, manajemen tersebut harus dilihat. Selain melihat daerah Bone yang begitu luas dan jumlah

penduduk yang cukup signifikan, adai faktor yang paling menentukan, yaitu faktor ekonomi.

Hal pertama yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengimbangan ekonomi real. Tetapi dalam hal ini harus ada pengelolaan menjadi ekonomi real, inilah yang kemudian harus dilakukan pemerintah untuk mencari investor. Apabila hal tersebut sudah diwujudkan dalam ekonomi, berarti dengan begitu pemekaran sudah tidak akan menjadi persoalan lagi, mengingat potensi ekonomi yang dimiliki oleh Bone bagian Barat seperti tersedianya pusat perdagangan (pasar sentral), pusat pertokoan dan lain-lain

Peningkatan dan pengembangan wilayah yang dilakukan pemerintah selalu dimaksudkan untuk meredakan isu pemekaran atau diperuntukkan untuk pemekaran. Jadi, yang dilakukan selama ini adalah tergantung kacamata orang yang ingin melihat bahwa apakah itu upaya untuk meredam pemekaran atau tidak. Apabila wilayah tersebut dipecah, itu karena pertimbangan kedekatan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu, apabila dilakukan perubahan manajemen yang kemudian diserahkan kepada perangkat dibawah, sama dengan manajemen fungsi yang dilakukan perangkat diatas, maka disatu sisi sudah dilakukan pendekatan dan pembangunan sampai dipelosok-pelosok. Ini berarti sudah menjadi bahagian kinerja pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Tapi yang pasti itu adalah sebuah program yang memang

harus dilakukan oleh pemerintah. Pada intinya baik dari aspek infrastruktur ataupun dari segi pengembangan ekonomi bisa dibangun dimana saja dan pada saatnya nanti masyarakat Bone pasti menginginkan adanya pemekaran wilayah.

B. 4. Jumlah penduduk

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Bone, khususnya wilayah Bone bagian Barat mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam kurun waktu Tahun 2005. Seperti, laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Lamuru sebesar 24. 922 jiwa, Kecamatan Ulaweng sebesar 25. 875 jiwa, Kecamatan Bengo sebesar 25. 830 jiwa, Kecamatan Palakka sebesar 21. 272 jiwa, Kecamatan Lamuru sebesar 22. 256 jiwa, Kecamatan Ponre sebesar 12. 921 jiwa, dan Kecamatan Tellu Limpoe sebesar 12. 908 jiwa. Hal ini berarti dengan jumlah penduduk yang sebesar itu, maka wilayah Bone bagian Barat cukup layak untuk dimekarkan.

B. 5. Sumber daya alam

Dengan melihat daerah Bone yang sangat kaya akan potensi alamnya yang memadai serta siap untuk dieksplorasi serta mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan potensi alam, seperti hutan, sawah dan perkebunan. Tinggal bagaimana dikelola dengan baik agar mencapai hasil yang lebih baik. Dari potensi yang ada tersebut maka, pemekaran

Kabupaten Bone, khususnya Bone bagian Barat sudah layak untuk dimekarkan.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab penutup ini akan diuraikan dua hal, yang pertama adalah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian ini dan kedua adalah saran-saran yang direkomendasikan oleh peneliti sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kedua hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut.

A. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat penulis tarik sebagai kesimpulan atas pembahasan mengenai rencana pemekaran di Kabupaten Bone Barat, yaitu :

1. Pertarungan kepentingan yang terjadi dalam pemekaran wilayah ditandai dengan dua ciri utama, yaitu kelompok pro dan kontra pemekaran. Pada kelompok yang pro, mereka berasal dari kalangan akademisi, kalangan elit dalam hal ini wakil ketua DPRD dan tokoh pemuda yang berasal dari Lappariaja, mereka menginginkan adanya pemekaran untuk mempermudah akses pelayanan masyarakat. Terdapat pula kelompok yang kontra, mereka berasal dari golongan elit, tokoh masyarakat Kab.Bone dan masyarakat di Kecamatan Bengo. Mereka tidak menyetujui adanya pemekaran karena mereka menganggap, bahwa pemekaran justru akan berdampak buruk, karena pihak yang

menginginkan adanya pemekaran mempunyai tujuan semata-mata didasarkan atas alasan subjektif yang menghendaki dan berharap untuk mendapat posisi pada kabupaten hasil pemekaran nanti serta sebagian masyarakat takut apabila pemekaran terjadi maka akan terjadi pula perpecahan atau pemisahan kultur budaya dalam masyarakat.

2. Faktor-faktor yang paling mendukung untuk terbentuknya suatu pemekaran wilayah adalah dari aspek sumber daya manusia, dimana sumber daya manusianya yang memenuhi standar apa lagi kalau ditinjau dari jumlah penduduk yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai dan memberdayakan sumber daya manusianya yang sebanding dengan jumlah penduduk yang ada sehingga memungkinkan untuk diadakan pemekaran wilayah. Aspek yang kedua adalah luas wilayah dan budaya dan aspek yang ketiga adalah potensi ekonomi, dimana pemerintah adalah melakukan pengimbangan ekonomi real. Tetapi dalam hal ini harus ada pengelolaan menjadi ekonomi real, inilah yang kemudian harus dilakukan pemerintah untuk mencari investor, mengingat potensi ekonomi yang dimiliki oleh Bone bagian Barat seperti tersedianya pusat perdagangan (pasar sentral), pusat pertokoan dan lain-lain. Aspek yang keempat adalah jumlah penduduk di Kab. Bone, khususnya wilayah Bone bagian Barat dalam kurun waktu

Tahun 2005 mengalami laju pertumbuhan yang pesat, ini memungkinkan bahwa wilayah Bone bagian Barat cukup layak untuk dimekarkan. Dan aspek yang kelima adalah sumber daya alam mengingat potensi ekonomi yang dimiliki oleh Bone bagian Barat seperti tersedianya pusat perdagangan (pasar sentral), pusat pertokoan dan lain-lain serta ditunjang dengan potensi alam seperti hutan, sawah, perkebunan yang dikelola dengan baik agar mencapai hasil yang lebih baik.

B. Saran

Demi tercapainya kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Diharapkan kepada pemerintah Kab Bone untuk memperhatikan pembenahan sarana infrastruktur seperti perbaikan jalan termasuk lorong-lorong, pusat perdagangan seperti pasar baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa atau kelurahan serta sarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas.
2. Diharapkan kepada Forum Pembentukan Kabupaten Bone Barat (FPK-BB) dalam merumuskan program yang akan dilakukan terkait dengan rencana pemekaran Bone Barat agar memperhatikan aspirasi masyarakat dan pengkajian terhadap potensi-potensi daerah yang akan dimekarkan dalam hal ini Bone bagian Barat.

GAMBAR PETA WILAYAH KAB. BONE



Ket :

□ : Wilayah Rencana Pemekaran Kab. Bone Barat

□ : Wilayah Induk Kab. Bone

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2006, *Kabupaten Bone Dalam Angka*, BPS, Bone
- Bottomore, T.B, 2006. *Elit dan Masyarakat*. Akbar Tandjung Institute; Jakarta
- Budiarjo, Miriam. 1986. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia; Jakarta
- Dharma, Agus. 1985. *Organisasi*, Erlangga; Jakarta
- Duverger, Maurice. 2002. *Sosiologi Politik*. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Eaton, Joseph, W. 1986. *Pembangunan Kelembagaan: dari Konsep ke Aplikasinya*. UI. Press; Jakarta
- Faisal, Sanafiah. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*. Rajawali Press; Jakarta
- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit: Suatu Bahasan Pengantar*. Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah; Yogyakarta
- Irawan, Presetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. DIA FISIP UI; Jakarta
- Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Mandar Maju; Bandung
- Kusnadi, Baharuddin. 1997. *Anatomi Konflik Sosial dalam Masyarakat Majemuk*, KOMPAS, 6 Desember, hal. 5
- Mansyur, Rifah, Nur. 2001. *Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah*. PT. Permata Artistika Kreasi; Depok

Moleong, Lexi J. 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung

Rauf, Maswadi. 2000. *Konsensus Politik : Sebuah Penjajagan Teoritis*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional; Jakarta

Salusu, J.1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. PT. Gramedia. Jakarta

Schoorl, J. W. 1980. *Modernisasi*. PT. Gramedia; Jakarta

Soekanto, Sardjono.1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Grasindo Persada; Jakarta

Varma, S. P. 2003. *Teori Politik Modern*. PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta

Dokumen-Dokumen

UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan, Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003. Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

<http://www.bone.go.id>, 22 Desember 2006

<http://www.fajar.co.id>, 07 Mei 2006

<http://www.kompas.co.id>, 06 Desember 2006

<http://www.kompas.co.id>, 10 Maret 2007

<http://www.google.co.id>, 15 Januari 2007